

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia ini lebih menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan Negara Indonesia karena sebagian besar APBN Negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri.

Riset yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *Pricewaterhouse Coopers UP (PwC)* menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif (TPE) yang harus dibayarkan perusahaan global yang berada di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia (iress.web.id dalam (Nugroho, 2011)). Rasio pajak efektif Indonesia adalah sebesar 28,1% berada di

urutan keempat, setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean, posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Oleh karena itu, Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 2009 untuk mengurangi tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia (Zulkarnaen, 2015). Kondisi tersebut memicu sebuah perusahaan untuk mencari celah dengan meminimalkan beban pajaknya, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak terhutang selama tidak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut *Tax Avoidance*. Aktivitas ini merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang semata-mata dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya (Sumomba, 2013). Hal tersebut dilakukan agar perusahaan mampu melakukan pengembangan pada bisnisnya dan membagikan dividen kepada pemegang saham. Segala bentuk pengembangan bisnis yang terjadi di dalam perusahaan dapat dengan mudah terjadi apabila perusahaan menerapkan *corporate governance* yang baik. Oleh karena itu, *corporate governance* menjadi perhatian penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001:1) mendefinisikan *corporate governance*, yang diperoleh dari definisi *Cadbury Committee*, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* merupakan tata kelola di dalam internal suatu perusahaan yang menjelaskan serangkaian hubungan berbagai pihak yang berpartisipasi untuk menentukan arah kinerja perusahaan.

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Annisa & Kurniasih, 2012). Pada tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman *Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan & Farahmita, 2012)

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan

dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar (Fadhilah, 2014). Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi. Dalam hal ini manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan variabel independen berupa kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, komite audit terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Kepemilikan institusional menurut Fadhilah (2014) merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Beberapa hasil penelitian yang menggunakan variabel kepemilikan institusional adalah Fadhilah (2014), Winata (2014), Khoirunnisa (2014), Sandy dan Lukviarman (2015), Dewi dan Sari (2015) yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Putranti dan Setiawanta (2015), Maharani dan Setiawanta (2014) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Pohan. 2008). Beberapa penelitian menggunakan Komisaris Independen yaitu Sabli dan Noor (2012), Fadhilah (2014), Dewi dan Sari (2015), Tendean (2015) Fajri *et al.* (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Tetapi penelitian yang dilakukan Winata (2014) Agung Wibawa *et al* (2016) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana, 2014). Audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Beberapa penelitian yang menggunakan Kualitas Audit adalah Annisa dan Kurniasih (2012), Putranti dan Setiawanta (2014), Sari dan Dewi (2014), menemukan hasil yang sama bahwa kualitas audit mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan dan positif, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Fadhilah (2014), Maharani dan Suardana (2014), Sandy dan Lukviarman (2016), Khoirunnisa (2015) Agung Wibawa *et al* (2016) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Fajri *et al.* (2015), Winata (2014),

menyimpulkan tidak berpengaruh secara signifikan.

Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena Bursa Efek Indonesia mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Beberapa penelitian yang menggunakan komite audit adalah Annisa dan Kurniasih. (2012), Fadhilah (2014), Winata (2014), Tendean (2015), Agung Wibawa *et al* (2016) menyatakan komite audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Sandy dan Lukviarman (2016), menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Putranti dan Setiawanta (2014), Sari dan Dewi (2014) dan Fajri *et al.* (2015) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari penelitian diatas masih terdapat hasil yang bervariasi. Untuk itu, peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) terdapat pada tiga hal. Perbedaan pertama, terletak pada sampel perusahaan yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pemilihan industri manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu *primary sector* di Bursa Efek Indonesia sehingga industri ini lebih mencerminkan keadaan pasar modal. Di samping itu, memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap jual. Hal ini dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut, sehingga membutuhkan sumber dana yang akan digunakan pada aktiva tetap perusahaan. Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan mereka, salah satunya dengan investasi saham oleh para investor. Sedangkan, untuk perusahaan non manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan manufaktur yang tidak melakukan kegiatan produksi.

Perbedaan kedua, yaitu terletak pada periode penelitian. Annisa dan Kurniasih (2012) menggunakan periode penelitian 2008, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan periode penelitian 2012-2015. Dengan menggunakan periode penelitian tersebut diharapkan hasil penelitian lebih mencerminkan keadaan terkini. Perbedaan ketiga terletak pada jumlah variabel penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menggunakan variabel dewan komisaris, sedangkan dalam penelitian ini variabel tersebut tidak digunakan karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya

prinsip-prinsip *corporate governance*, variabel sudah termasuk kedalam variabel jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Book Tax Gap* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh presentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
2. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *corporate governance* dari suatu perusahaan.
3. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dan dorongan bahwa *corporate governance* sangat penting terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan pajaknya. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut. Jadi manajemen dapat merancang suatu *corporate governance* yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan

hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.